



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Desember 2020

Halaman: 2

**Batasi Pergerakan Warga,
DPRD DIY Usulkan PSBB**

YOGYA (MERAPI) - DPRD DIY mengusulkan kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X perlunya mempertimbangkan peluang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya peningkatan kasus positif Covid-19 di Yogyakarta kian masif.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mengatakan pihaknya akan mengusulkan ke Gubernur untuk mempertimbangkan peluang PSBB, atau setidaknya pembatasan yang ketat, misalnya menutup tempat-tempat hiburan, tempat wisata, dan kembali menerapkan semi Work From Home (WFH) untuk perkantoran.

"Kami besok siang mengundang gugus tugas, menyikapi semua. Kalau saya pribadi perlu dilakukan semacam pembatasan. Karena kalau kita mengandalkan proses di masa liburan. Meski ada swab antigen, itu yang sopi hotel-hotelnya tapi jalannya ramai semua," jelasnya, Senin (28/12).

Huda menegaskan pembatasan mobilitas masyarakat penting dilakukan, karena salah satu langkah efektif mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah dengan mengendalikan pergerakan manusia. Apabila tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, menurutnya dapat diambil jalan tengahnya.

"Menurut saya kalau belum mampu jalan tengahnya. Kantor dimasukkan kayak dulu lagi, di WFH kan. Dua minggu ke depan. Tempat wisata yang dikelola pemda ditutup dulu. Tempat keramaian begitu di jaga ketat. Model formulasi de-

ngan pembatasan pergerakan manusia dengan ketat sekarang ini," jelasnya.

Pembatasan dilakukan tidak terbatas orang dari luar Yogyakarta, termasuk warga asli Yogyakarta, mengingat kondisi penularan Covid-19 saat ini justru melalui orang terdekat baik lingkungan pekerjaan, tetangga, maupun keluarga.

"Karena kluster keluarga sudah banyak. Transmisi lokal masif. Yang ada pembatasan pergerakan orang bukan hanya dari luar," imbuhnya.

Sementara, Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan masukan DPRD DIY akan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi. "Saya kira jadi satu wacana. Karena kondisi seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan nanti di gugus tugas," ujarnya.

Menurutnya, PSBB sebetulnya mengarah kepada mengendalikan kluster penularan dari luar Yogyakarta, sedangkan kondisi saat ini penularan justru terjadi di lingkungan terdekat.

"Sekarang klusternya sudah kluster tetangga. Tentu juga sulit mengendalikan karena PSBB lebih ke arah mengendalikan kluster dari luar bagi yang pergi dan datang. Tapi kita perlu analisa sehingga masuk itu saya kira penting untuk bahan teman-teman gugus," jelasnya.

Aji menyebut pihaknya juga akan meminta masukan dari epidemiolog sebagai upaya mengendalikan persebaran kasus positif Covid-19 di Yogyakarta.

"Kita juga akan minta masukan kalangan epidemiologi apa yang kita lakukan ke depan. Kita harus mengusahakan, mengupayakan yang terbaik supaya tidak ada penularan lebih banyak lagi," jelasnya.

(C-4)-d

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggap

☐ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005